

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi.

Permasalahan utama antar agen (*agent*) dan prinsipel (*principal*) ialah adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen and Meckling dalam Sari dan Adhariani, 2008), pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan, dan pengendalian fungsi-fungsi dalam perusahaan (Fama dan Jensen dalam Sari dan Adhariani, 2008). Teori agensi merupakan teori yang membahas masalah-masalah yang muncul antara prinsipel dan agen akibat adanya beberapa pemisahan yang telah diungkapkan.

Dalam teori agensi dikenal juga istilah hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling dalam Rahmawati, dkk. seperti dikutip Wisnumurti (2010) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara manajer selaku agen dengan pemilik perusahaan sebagai prinsipel. Agen diberi wewenang dan otoritas untuk menjalankan perusahaan oleh prinsipel untuk memenuhi kepentingan prinsipel sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Manajer ialah pihak yang mempunyai informasi lebih banyak dari pada prinsipel, sehingga prinsipel mengharuskan manajer untuk memberikan

informasi mengenai perusahaan. Prinsipel menginginkan informasi yang disampaikan oleh manajer ialah informasi yang andal dan dapat dipercaya, karena informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan yang penting bagi pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan. Terkadang hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Manajer akan memanfaatkan asimetri informasi ini untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipel demi kepentingan manajer.

Terdapat asumsi bahwa manusia mempunyai 3 sifat dasar berkaitan dengan teori agensi, yaitu: 1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri; 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang; dan 3) manusia selalu ingin menghindari resiko (Eisenhardt dalam Rusiadi, 2010). Prinsipel mendirikan perusahaan dan membuat kontrak dengan manajer bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipel, namun manajer juga manusia yang ingin memaksimalkan kepentingan dirinya.

Contoh kepentingan yang ingin dimaksimalkan oleh manajer ialah hak investasi, prestasi, kompensasi, dan lain-lain (Halim dkk., 2005). Agen akan memberikan informasi seolah-olah perusahaan yang ia kelola berjalan dengan baik, lalu terjadilah asimetri informasi. Perilaku oportunistik manajer selaku agen ini akan menyebabkan munculnya masalah keagenan (*agency*

problem). Masalah keagenan sangat rentan terjadi ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipel.

Di Indonesia perusahaan-perusahaan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dalam praktik akuntansi, berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan beban untuk periode sekarang. Dengan adanya sifat oportunistik agen, tidak dapat dielakkan adanya kemungkinan agen memanfaatkan pos-pos akrual untuk memaksimalkan kepentingannya (Midiastuty dan Machfoedz, 2003) yang belum tentu sesuai dengan kepentingan prinsipel. Salah satu bentuk pemanfaatan dasar akrual disini ialah dengan menyajikan laba dan aktiva terlalu optimis (*overstated*). Haniati dan Fitriany (2010) mengemukakan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan yang paling banyak dilakukan adalah *overstated* laba.

Teori agensi erat kaitannya dengan asimetri informasi, dimana asimetri informasi muncul akibat adanya masalah keagenan. Hal ini juga diperkuat dengan yang dikemukakan oleh Eisenhard dalam Khomsiyah (2003) bahwa terdapat 2 masalah pokok dalam teori agensi berkaitan dengan asimetri informasi, yaitu: 1) *adverse selection*, dimana ada informasi yang disembunyikan agen dari prinsipel secara sengaja; 2) *moral hazard*, dimana agen melakukan tindakan yang menyeleweng dari kontrak yang tidak diketahui oleh prinsipel.

2. Konservatisme.

Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dimana perusahaan tidak terlalu cepat mengakui aktiva dan laba serta secepatnya mengakui kerugian dan hutang yang kemungkinan akan terjadi (Watts dalam Haniati dan Fitriany, 2010). Konservatisme juga didefinisikan sebagai pengakuan biaya dan rugi lebih awal serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan (Givoly dan Hayn, 2006). Prinsip konservatisme tidak lepas dari pemilihan metoda akuntansi yang konservatif. Metoda akuntansi yang akan dipilih dalam penerapan prinsip konservatisme ialah metoda akuntansi yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi.

Dalam aktivitas bisnis banyak resiko yang timbul akibat ketidakpastian di masa yang akan datang. Konservatisme berguna untuk menghadapi resiko bisnis. Estimasi atas pendapatan dan laba dilakukan lebih rendah. Contoh penerapan metode akuntansi yang konservatif ialah memilih membebankan pengeluaran R&D (*Research & Development*) seperti pengeluaran pengembangan *software* baru daripada mengkapitalisasikannya sebagai aset, kemudian diamortisasi (Haniati dan Fitriany, 2010). Hal ini dilakukan karena pengeluaran R&D merupakan pengeluaran yang beresiko, sebab hasilnya belum cukup pasti untuk dikapitalisasikan sebagai aset.

Basu dalam Haniati dan Fitriany (2010) menyatakan bahwa konservatisme merupakan praktik mengurangi laba (mengecilkan aktiva bersih) dalam merespons berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespons berita baik (*good news*). Proses ini menyebabkan pengakuan aset lebih lambat daripada pengakuan biaya dan rugi.

Terdapat tiga bentuk pengukuran konservatisme yang diklasifikasikan oleh Watts dalam Haniati dan Fitriany (2010), yaitu:

(1) *Earning/Accrual Measures.*

(a) *Accrual Base*

Givoly dan Hayn (2000) menghitung akrual dari selisih antara laba bersih (*net income*) dengan arus kas (*cash flow*). *Net income* yang digunakan adalah laba bersih sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan adalah arus kas dari kegiatan operasi perusahaan.

Semakin negatif nilai akrualnya menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin konservatif (Givoly dan Hayn, 2006). Hal ini selaras dengan definisi konservatif yang segera mengakui biaya dan menunda pengakuan pendapatan, sehingga laba yang disajikan pada laporan keuangan lebih rendah dari pada jumlah kas yang ada pada arus kas operasional.

Depresiasi tidak mempengaruhi arus kas operasional, melainkan arus kas investasi. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Alokasi biaya depresiasi yang ada dalam *net income* mempengaruhi arus kas investasi, bukan operasi, sehingga biaya depresiasi harus dikeluarkan dari laba bersih yang digunakan dalam persamaan ini.

(b) *Conservatism Accrual*

Conservatism Accrual (Conv_accrual) didapatkan dari hasil pembagian akrual non operasi dengan total aset. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif yang disebabkan karena laba non operasi lebih rendah dari *cash flow* yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu (Givoly dan Hayn, 2006).

Model ini menggunakan nilai akrual non operasi yang mencerminkan pencatatan kejadian buruk pada perusahaan. Semakin cepat pengakuan *bad news* yang biasanya mempengaruhi laba non operasi pada perusahaan tersebut, semakin rendah penyajian laba pada laporan keuangannya dan semakin tinggi tingkat konservatismenya. Pada model ini nilai akrual yang dicari ialah akrual dari kegiatan non operasi yang didapat dari selisih total akrual dengan akrual dari kegiatan operasi (Zhang dalam Haniati dan Fitriany, 2010).

(c) *Discretionary Accrual*

Untuk menghitung *discretionary accrual* terdapat beberapa model. *Discretionary accrual* yang paling sering digunakan adalah *discretionary accrual* model Kasznik (1999) (Ilaniati dan Fitriany, 2010). *Discretionary accrual* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya manipulasi laba yang dilakukan manajemen. *Discretionary accrual* dihitung dengan cara menyelisihkan *total accrual* (TACC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDACC) (Dechow dalam Halim, 2005).

Discretionary accrual ialah akrual yang timbul karena perubahan *judgement*, metoda akuntansi, dan pergeseran biaya/pendapatan karena niat manajer, bukan karena kondisi perusahaan, dan hal tersebut menggambarkan tingkat manajemen laba. *Non-discretionary accrual* adalah kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan kondisi perusahaan, misalnya penyesuaian peningkatan pendapatan perusahaan menyebabkan penyesuaian estimasi tingkat piutang tak tertagih (Dewi dalam Halim, 2005). Jika nilai *discretionary accrual* meningkat, maka manajemen laba juga meningkat dan tingkat konservatisme menurun.

(2) *Book to Market Ratio*

Salah satu pengukuran konservatisme berdasarkan *net asset measure* ialah *book to market ratio* yang merupakan rasio nilai buku saham terhadap nilai pasar saham (Duellman dalam Haniati dan Fitriany, 2010). Semakin kecil nilai rasionya, maka perusahaan tersebut semakin konservatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai buku yang dicatat perusahaan lebih konservatif, sehingga tersaji lebih rendah dari nilai pasarnya (Ahmad dan Duellman, 2007).

Pada model ini tingkat konservatisme dihitung dengan membandingkan nilai buku saham terhadap rata-rata nilai pasar saham perusahaan. Semakin kecil nilai *book to market ratio*, semakin tinggi tingkat konservatismenya.

(3) *Earning/Stock Return Relation Measure*

Model ini ialah model yang dikembangkan oleh Basu (1997). Basu menyatakan bahwa *stock market price* menyajikan informasi mengenai perubahan atas rugi ataupun laba sesuai dengan waktunya. Penerapan konservatisme menyebabkan pengakuan lebih cepat untuk kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*bad news*) dibandingkan *good news*, sehingga terjadi asimetri waktu pengakuan dan *bad news* lebih terefleksi dalam laba dibandingkan *good news* (Haniati dan Fitriany, 2010).

Pada model pengukuran ini tingkat konservatisme akan semakin tinggi jika *earning/stock return relation measure* semakin rendah. *Earning/stock return relation measure Return* merupakan perbandingan antara laba per lembar saham terhadap harga saham pembukaan di awal periode. *Return* saham yang didapat akan semakin kecil jika tingkat pengakuan *bad news* lebih tinggi.

3. Corporate Governance.

Definisi *Corporate Governance* (CG) ialah susunan aturan yang mengatur hubungan pemegang saham dengan manajemen, kreditor, pemerintah, *stockholder*, dan pihak lainnya, sesuai hak dan tanggung jawabnya (Wisnumurti, 2010). CG menjadi alat untuk menjamin direksi dan manajer bertindak yang terbaik bagi kepentingan investor (Prowson dalam Hastuti, 2010).

Suratman dalam Rusiadi (2010) memaparkan beberapa manfaat CG, yaitu: 1) efisiensi entitas bisnis; 2) meningkatkan kepercayaan publik; 3) menjaga perusahaan untuk *going concern*; 4) mengukur target kinerja manajemen perusahaan; 5) meningkatkan produktifitas; dan 6) menurunkan distorsi akuntansi. CG merupakan mekanisme yang penting untuk mengelola perusahaan dengan baik.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG

diterapkan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah (Wisnumurti, 2010):

1. Transparansi (*transparency*)

Informasi yang disediakan perusahaan haruslah material, relevan, serta mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Bila informasi tersebut penting untuk diungkapkan, maka harus diungkapkan walaupun tidak diatur dalam perundang-undangan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Pengelola perusahaan bertanggung jawab atas kinerja dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Pertanggung jawaban ini diutamakan untuk kepentingan investor. Perusahaan dikelola dan dinilai sesuai kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham serta pihak lain yang berkepentingan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjamin dihormatinya hak-hak pihak yang berkepentingan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*independency*)

Perusahaan dikelola secara independen, yaitu dikelola oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak tertentu,

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi dalam tata kelola perusahaan merupakan hal penting untuk menjaga agar pihak-pihak terkait dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Terdapat batasan-batasan bagi pihak perusahaan dalam mengelola perusahaan agar kepentingan pihak lain yang berkaitan tetap terjaga sesuai dengan batasan-batasan tersebut.

Pengukuran CG yang biasa digunakan ialah pengukuran dengan prosentase elemen-elemen mekanisme CG tertentu atau dengan *Corporate Governance Perceptions Indeks* (CGPI). Pada penelitian dengan pengukuran yang pertama, menggunakan beberapa elemen *Corporate Governance*, yaitu komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit, komposisi kepemilikan publik, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah *meeting* komite audit, jumlah *meeting* dewan komisaris, dan lain-lain.

Pengukuran CG yang ke-2 yaitu pengukuran yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) yang hasilnya disebut

dengan *Corporate Governance Perceptions Indeks* (CGPI). IICG mendefinisikan CGPI sebagai hasil riset dan pemeringkatan CG dengan menyelaraskan sistem GCG dalam proses bisnis melalui manajemen stratejik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CG tidak selesai pada tahap penetapan sistem dan implementasinya, namun perlu dilakukan evaluasi dan mempercepat terwujudnya GCG menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para Direksi, Komisaris, Manajemen puncak, karyawan dan *stakeholders* perusahaan yang semuanya dicerminkan dalam semua proses penetapan dan pelaksanaan strategi-strategi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (manajemen stratejik).

IICG menentukan CGPI dengan menilai faktor-faktor berikut:

1. Komitmen yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
2. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan akurat, termasuk informasi tentang proses merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.

3. Akuntabilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar, termasuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
4. Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dalam menjamin terlaksananya proses perumusan, implementasi serta evaluasi strategi secara bertanggung jawab, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
5. Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya, termasuk dalam menjamin tidak adanya dominasi dan intervensi dari satu partisipan manapun dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
6. Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*), termasuk dalam

memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melaksanakannya.

7. Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif, termasuk menunjukkan kemampuannya untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi secara tepat, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk melakukannya juga.
8. Kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan organisasi kearah yang lebih baik, termasuk dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat membimbing organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
9. Kemampuan Bekerjasama yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama secara bermartabat, termasuk dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini

dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.

10. Visi, Misi dan Tata Nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang dilakukannya, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong menumbuhkan keinginan dihati para anggota perusahaan untuk mencapai pokok-pokok tersebut.
11. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai dengan prinsip GCG, termasuk dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.
12. Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya.

4. Asimetri Informasi.

Asimetri informasi adalah situasi dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan prinsipel (Wisnumurti, 2010). Ketika agen (manajer) memiliki informasi yang lebih banyak dari pada prinsipel, maka agen yang pada dasarnya mempunyai sifat oportunistik akan memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Prinsipel tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen dan prinsipel tidak dapat menilai kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola perusahaan.

Asimetri informasi terjadi apabila ada dua belah pihak yang memiliki informasi berbeda ketika akan melakukan proses negosiasi, misalnya antara calon penjual dan calon pembeli suatu investasi (Haniati dan Fitriany, 2010). Informasi merupakan komponen utama bagi pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan bernegosiasi. Ada selisih informasi yang terbentuk akibat kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh para investor yang dapat menggambarkan tingkat asimetri informasi yang terjadi. Welker dalam Veronica dan Bachtiar (2006) membuktikan bahwa asimetri informasi yang diukur melalui perbedaan harga penawaran dan pembelian (*bid-ask spread*), akan berkurang dan likuiditas pasar meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat pengungkapan.

Menurut Scott dalam Wisnumurti (2010), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

- (1) *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta pihak internal lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Ada kemungkinan terdapat informasi penting yang sengaja disembunyikan dari prinsipel
- (2) *Moral hazard*, yaitu bahwa adanya tindakan yang dilakukan manajer diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Bid Ask spread merupakan model pengukuran asimetri informasi dengan melihat data saham yang terjadi akibat kegiatan negosiasi jual-beli saham. Wisnumurti (2010) menjabarkan bahwa ketika investor ingin bertransaksi jual-beli saham atau sekuritas lain di pasar modal, biasanya transaksi dilakukan melalui *broker/dealer* yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. *Broker/dealer* inilah yang siap untuk menjual kepada investor dengan harga *ask* jika investor ingin membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka *broker /dealer* ini yang akan membeli sekuritas dengan harga *bid*. *Spread* merupakan selisih dari *bid* (harga beli tertinggi) dengan *ask* (Harga jual terendah) bagi *broker/dealer* yang bersedia untuk membeli dan menjual suatu saham.

Menurut Komalasari dalam Wisnumurti (2010). pada mekanisme pasar modal, pelaku pasar modal juga menghadapi masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritasnya, sehingga aktivitas yang mereka lakukan dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (*insider trading*). *Dealers* atau *market-makers* memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan *informed traders* (pedagang terinformasi). Hal inilah yang menimbulkan *adverse selection* yang mendorong *dealers* untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang likuid. Jadi dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara *dealer* dan pedagang terinformasi tercermin pada *spread* yang ditentukannya. Semakin besar *bid ask spread* memperlihatkan asimetri informasi yang semakin besar juga.

Kanagaretnam *et al.* (2007) menghitung asimetri informasi dengan menghitung selisih *spread* (CSPREAD) yang merupakan selisih dari rata-rata presentase *spread* pada periode *announcement* dengan rata-rata persentase *spread* pada periode *non announcement*. Berikut persamaannya:

B. Pengembangan Hipotesis.

1. Konservatisme dan Asimetri Informasi.

Asimetri informasi yang terjadi antara manajer dengan investor dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memindahkan kekayaan para investor ke tangan manajer dengan melakukan manipulasi laporan keuangan (Lafond dan Watts, 2007). Manajer mempunyai kepentingan pribadi, yang belum tentu sesuai dengan kontrak atau kepentingan para investor. Dengan adanya asimetri informasi, maka manajer akan terdorong untuk melakukan manipulasi laporan keuangan.

Selain menjadi penyebab bagi kegiatan manipulasi informasi, asimetri informasi juga dapat menjadi akibat dari manipulasi informasi yang dilakukan oleh agen. Salah satu contohnya ialah ketika manajemen yang oportunistik melakukan manajemen laba, maka kegiatan manajemen laba yang dilakukan manajer untuk kepentingannya tersebut tidak akan dibebankan kepada para investor. Semakin banyak informasi yang dipalsukan atau tidak disampaikan terhadap investor, semakin banyak informasi yang asimetri akibat kegiatan manipulasi informasi tersebut.

Bentuk manipulasi informasi yang paling umum dilakukan ialah manajemen laba. Menurut Haniati dan Fitriany (2010) bentuk manajemen laba yang paling banyak dilakukan ialah manajemen laba yang membesar-besarkan laba, sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan laba atau aktiva yang

overstatement. Konservatisme merupakan prinsip yang layak digunakan untuk menghadapi masalah ini, dimana penerapan konservatisme akan menyebabkan laporan keuangan tersaji lebih rendah akibat prinsip kehati-hatian yang dipegang dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang.

Dengan adanya prinsip konservatisme, tidak hanya akan mengurangi penyajian laba yang *overstatement*, tapi juga akan membatasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Penerapan akuntansi yang konservatif ini akan mengurangi tingkat asimetri informasi, karena tingkat manajemen laba yang dilakukan manajer akan berkurang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lafond dan Watts (2007) menjelaskan bahwa konservatisme mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan batasan kepada manajemen dalam menggunakan informasi yang mereka miliki untuk melindungi kepentingan investor. Pembatasan penggunaan informasi ini ditujukan untuk membatasi tindakan manajemen laba oleh manajer dalam mengatasi masalah agensi antara manajer dengan investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Lafond dan Watts (2007) ini menggunakan model Basu dan *Market to Book Ratio* untuk mengukur tingkat konservatisme dan melihat proksi mana yang paling berpengaruh terhadap asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri diukur dengan menggunakan *PIN score* milik Easley dan O'Hara (1992). Jumlah sampel yang diteliti ialah

sebanyak 20.389 sampel perusahaan selama periode pengamatan tahun 1983 sampai dengan tahun 2001 terhadap perusahaan yang terdaftar di NYSE dan AMEX dengan tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model Basu merupakan model konservatisme yang paling berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi.

Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniati dan Fitriani (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat konservatisme akan menyebabkan tingkat asimetri informasi yang lebih rendah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan periode pengamatan selama 2 tahun, yaitu tahun 2007 dan 2008. Sampel yang digunakan ialah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak bergerak pada bidang jasa keuangan dan investasi.

Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan 4 proksi dalam mengukur tingkat konservatisme untuk melihat proksi mana yang menggambarkan pengaruh konservatisme yang paling kuat terhadap asimetri informasi. Proksi tersebut ialah model *Accrual Base*, *Conservatism Accrual*, *Discretionary Accrual*, dan *Book to Market ratio*. Kesemua proksi yang digunakan tersebut dapat membuktikan pengaruh negatif tingkat konservatisme terhadap asimetri informasi. Namun model yang paling berpengaruh dan paling mampu menjelaskan asimetri informasi ialah model *Conservatism Accrual*, setelah itu model *Accrual Base* menyusul, dan yang paling kecil pengaruhnya

ialah model *Discretionary Accrual*, dan *Book to Market ratio*. Sedangkan proksi untuk asimetri informasi yang digunakan ialah nilai CSPREAD.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat konservatisme dalam laporan keuangan, semakin rendah asimetri informasi yang muncul antara manajer dengan investor luar. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Konservatisme berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi

2. *Corporate Governance* dan Asimetri Informasi.

Penerapan *Corporate Governance* (CG) yang baik akan menciptakan hubungan yang kondusif antar entitas yang berkaitan dengan perusahaan mengenai hak dan kewajibannya. CG muncul akibat adanya konflik keagenan dan mengutamakan kepentingan para investor serta pihak luar lainnya yang berkepentingan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan mengenai pentingnya penyajian informasi yang akuntabilitas, transparan, dan relevan yang harus disampaikan oleh manajer terhadap investor. Keberadaan CG akan mengurangi asimetri informasi, karena adanya peraturan mengenai penyajian informasi sesuai yang diatur dalam CG.

Corporate Governance juga merupakan tata kelola bagi suatu perusahaan yang tata kelola tersebut diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk resiko bagi semua pihak yang terlibat, serta sebuah bentuk

perlindungan terhadap investor. CG juga mencakup aturan yang mengantisipasi manajer dan pihak lainnya melakukan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan tersebut ialah manipulasi laporan keuangan. Ketika *Corporate Governance* semakin baik, maka tingkat manipulasi laporan keuangan akan semakin menurun, kualitas informasi akan meningkat dan asimetri informasi yang disebabkan oleh manipulasi laporan keuangan akan ikut menurun.

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan CG akan menurunkan tingkat asimetri informasi. Peningkatan kepemilikan publik yang tinggi akan meningkatkan CG dan menurunkan asimetri informasi. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh masyarakat, maka semakin tinggi tekanan untuk memberikan pengungkapan yang lebih baik untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak dalam memasarkan sahamnya (Dedman *et al.*, 2004). Pada penelitian ini digunakan sampel dari perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi di Jerman. Periode pengamatannya ialah tahun 2000-2006. Proksi untuk mengukur asimetri informasi ialah *bid-ask spread*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kanagaretnam *et al.* (2007) membuktikan pengaruh negatif mekanisme *Corporate Governance* terhadap asimetri informasi selama periode *announcement*. Sampel yang diteliti ialah perusahaan yang terdaftar di NYSE dan AMEX yang melaporkan laporan keuangan tahunan. Periode penelitian yang dilakukan ialah selama tahun 2000

sampai dengan tahun 2006. Proksi asimetri informasi yang digunakan ialah CSPREAD, dan proksi *Corporate Governance*-nya terdiri dari beberapa mekanisme *Corporate Governance*.

Mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan ialah pertama, *board independence* yang terdiri dari proporsi direktur komisaris independen dan proporsi komite audit independen. Semakin besar proporsi dewan independen, menunjukkan profesionalisme perusahaan yang semakin baik. Mekanisme kedua ialah *board activity* yang terdiri dari Jumlah *meeting* komite audit dan jumlah *meeting* dewan komisaris. Semakin tinggi jumlah *meeting* yang dilakukan akan meningkatkan tingkat efisiensi komunikasi dan kinerja dewan pengurus.

Selanjutnya mekanisme yang terakhir ialah proporsi kepemilikan manajer dan karyawan yang akan mendorong manajer dan karyawan bekerja lebih profesional, karena ada kekayaannya yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Corporate Governance* yang semakin baik akan menurunkan asimetri informasi. Ketiga mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang diterima hipotesisnya, dimana ada pengaruh negatif *Corporate Governance* terhadap asimetri informasi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Ashbough *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa peningkatan mekanisme *Corporate Governance* akan

meningkatkan integritas informasi berupa laporan keuangan yang kemudian dapat menurunkan tingkat asimetri informasi. Mekanisme *Corporate Governance* yang mendukung pernyataan dalam penelitian tersebut ialah kepemilikan institusional, keberadaan komisaris independen dan keberadaan komite audit yang akan meningkatkan monitoring dan efisiensi kinerja manajemen, dan kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit suatu perusahaan yang dilihat dari banyaknya klien industri maupun non industri sejenis yang telah diaudit oleh KAP tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi.

Semakin tinggi tingkat *Corporate Governance* suatu perusahaan, Maka semakin rendah asimetri informasi. Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi